



PHRI DIY Tolak Rencana Perpanjangan PSTKM

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah berencana memperpanjang Penetapan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) Jawa-Bali. Rencana itu turut disorot oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang secara tegas menolak jika rencana

perpanjangan PSTKM dilaksanakan.

Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syafrizal, dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ belum lama ini.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono,

mengatakan, sejauh ini pihak PHRI masih belum menerima surat resmi rencana perpanjangan PPKM tersebut. "Tapi yang jelas PHRI menolak kok. Karena kami ini sebelumnya sudah melaksanakan prokes. Dari

● ke halaman 15

PHRI DIY Tolak

● Sambungan Hal 9

Sertifikasi dan verifikasi. Yang sekarang kami harapkan itu kan pemerintah itu hanya mencegah. Nah, mencegah itu kan gak perlu PSTKM," katanya, kepada *Tribun Jogja*, Kamis (21/1)

la menjelaskan, pencegahan penyebaran Covid-19 bukan dengan melakukan pembatasan-pembatasan yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi yang selama ini dirasakan.

Namun, pencegahan penyebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan kedisiplinan menjaga proses sesuai anjuran. "Pemerintah harus bisa memberikan edukasi proses kepada masyarakat. Gak usah dengan cara mematikan usaha masyarakat," jelasnya.

Sejama ini, lanjut Deddy, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 selalu mendadak, sehingga dampaknya mematikan sumber usaha masyarakat. "Kalau

pembatasan dilakukan ya berikan kami relaksasi. Atau paling tidak berikan kami solusi," ujar Deddy.

Meski usaha perhotelan masih tetap buka 24 jam dan tetap bisa melayani tamu, namun adanya pembatasan sektor pariwisata, kuliner dan tempat-tempat lainnya diakui olehnya turut berdampak terhadap bisnis perhotelan.

"Secara tidak langsung dampak PPKM ini orang mau datang ke Jogja jadi malas. Karena misal dari wilayah asal diizinkan keluar, tapi masyarakat khawatir di kota Jogja bagaimana aturannya. Ini menjadi kebingungan masyarakat," imbuhnya.

Sebagai bahan pertimbangan penolakan perpanjangan PPKM dari PHRI, Deddy menjelaskan target okupansi saat peak season awal tahun yang seharusnya 70 persen, kenyataan yang ditemui hanya 18,5 persen.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan munculnya kebijakan PPKM dari pemerintah yang mengakibatkan okupansi hotel di Yogyakarta terjun bebas hingga

13,5 persen sejak 11 Januari lalu dan sampai hari ini terus turun hingga 10,8 persen.

"Ini evaluasi kami. Ini loh dampaknya. Kalau diperpanjang kami sudah bingung program apa yang akan kami buat," tegasnya.

la melanjutkan, saat ini PHRI membutuhkan relaksasi dari pemerintah. Namun di 2021 ini PHRI masih belum mendapat kejelasan apakah akan mendapat hibah seperti tahun 2020 kemarin.

Sementara total hotel dan restoran di DIY yang masih bertahan saat pandemi Covid-19 menurut data PHRI sampai hari ini hanya sebanyak 170, dengan 200 yang lain dalam kondisi setengah limbung dan 30 lainnya sudah tidak bisa bertahan.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, sebelumnya mengatakan, akan berat jika Pembatasan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) terus diperpanjang. Dampaknya, pada masyarakat, terutama di bidang ekonomi akan besar. Ia mengharapkan PTKM tak lagi diperpanjang,

tetapi alih-alih dengan memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang ada.

"Masyarakat kita secara ekonomi sudah sangat berat. PTKM menurunkan berbagai macam omset wisata dan lain-lain. Kalau PTKM diperpanjang, kalau memang itu sebuah keterpaksaan bagaimana. Itu pil pahit yang harus kita rasakan bersama. Saya harap PTKM tidak diperpanjang lagi setelah besok. Nanti kita akan menyiapkan sistem pelayanan kesehatan diperkuat. Ada sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah dan pihak RS negeri maupun swasta," ujarnya.

Meski demikian, untuk saat ini PTKM memang jadi opsi yang tersedia untuk menurunkan kasus Covid-19 di DIY. Jika tak diberlakukan, malah akan terjadi lonjakan kasus yang lebih besar daripada sekarang. PTKM dinilai masih efektif, terlihat dari kegiatan masyarakat seperti di Malioboro yang sudah banyak berkurang dengan adanya PTKM, sehingga risiko penularan akan berkurang. (tro/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 19 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005